

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

PSAK No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” mengatur pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan sendiri entitas induk atau investor dengan pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas investee yang disajikan sesuai dengan PSAK 65; laporan keuangan konsolidasian atau PSAK 4; laporan keuangan tersendiri. Salah satu pengungkapan yang diwajibkan adalah pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci. Pembayaran ini bersifat penting karena merepresentasikan performa perusahaan dan kualitas manajerial (Conyon dan He 2011).

Kompensasi menurut Andrew Sikula (1981:316) *“Compensation is the broadcast employee remuneration concept benefits and services are a part”* Kompensasi adalah konsep remunerasi karyawan yang sangat luas meliputi administrasi, gaji, upah serta tunjangannya, dan pelayanan-pelayanan bagi karyawan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa mereka kepada perusahaan (Hani Handoko, 2001:155). Kompensasi merupakan salah satu cara yang paling efektif bagi perusahaan guna meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Kompensasi manajemen kunci adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayarkan, terutang atau diberikan oleh entitas, kepada orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin

dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas. Kompensasi bagi manajemen terdiri dari gaji, bonus, tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada manajemen sebagai imbalan atas waktu, tenaga dan pikiran yang dicurahkan kepada perusahaan.

Pembayaran kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Notoatmojo (2003:155) dalam mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi pembayaran kompensasi yaitu (1) produktivitas kerja, (2) kemampuan untuk membayar, (3) kesediaan untuk membayar, (4) suplai dan permintaan tenaga kerja, (5) organisasi karyawan dan (6) peraturan perundang-undangan. Faktor pertama produktivitas kerja, perusahaan selalu berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan material maupun non-material. Oleh karena itu perusahaan harus mempertimbangkan produktivitas kerja karyawan dalam kontribusinya kepada perusahaan. Perusahaan tidak memberikan kompensasi yang melebihi kontribusi karyawan kepada perusahaan. Faktor kedua kemampuan untuk membayar, pembayaran kompensasi bergantung kepada kemampuan membayar dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan tidak akan memberikan kompensasi melebihi kemampuannya. Faktor ketiga kesediaan untuk membayar, kesediaan membayar berpengaruh terhadap pembayaran kompensasi, banyak perusahaan yang mampu memberikan kompensasi yang lebih tetapi belum tentu perusahaan bersedia memberikan kompensasi yang memadai. Faktor keempat suplai dan permintaan tenaga kerja, pemberian kompensasi dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja di pasaran kerja. Tenaga kerja yang memiliki kemampuan lebih baik dari

yang ada di pasaran kerja maka akan mendapatkan kompensasi yang lebih daripada mereka yang kemampuannya sudah banyak di pasaran kerja. Faktor kelima organisasi karyawan, organisasi karyawan akan memperjuangkan hak anggotanya untuk memperoleh kompensasi yang seimbang, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pembayaran kompensasi. Faktor yang keenam peraturan perundang-undangan, semakin baik sistem pemerintahan maka akan semakin baik sistem perundang-undangnya, terbukti dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kompensasi yang tentunya akan berpengaruh terhadap pembayaran kompensasi itu sendiri. Faktor-faktor tersebut juga dibuktikan dengan penelitian Sudarmin Malik (2016) yang mengungkapkan bahwa produktivitas kerja, kemampuan untuk membayar, kesediaan untuk membayar, permintaan tenaga kerja, dan organisasi karyawan dominan mempengaruhi kompensasi.

Pembayaran kompensasi kepada manajemen kunci dapat menimbulkan bahaya moral dalam manajemen sehingga dapat memicu konflik keagenan. Bhattacharya dan Spiegel (1991) menyatakan bahwa konflik keagenan memungkinkan manajemen sebagai pihak yang memahami bisnis perusahaan untuk menjadi oportunis sehingga memberikan informasi untuk kepentingan pribadinya dan tidak memberikan informasi yang luas kepada pemegang saham. Konflik keagenan dapat timbul antara pemegang saham pengendali (mayoritas) dan non-pengendali (minoritas). Pemegang saham pengendali (mayoritas) dapat menempatkan anggota keluarganya di dalam manajemen tersebut dan dapat mengawasi tindakan manajemen dengan lebih efektif (Anderson dan Reeb

2003). Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci diantaranya srtuktur good corporate governance, kualitas audit dan *premanaged earnings*.

Manajemen atau pemegang saham pengendali memiliki informasi yang lebih banyak salah satunya adalah pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Basset et al(2007) menyatakan bahwa pengungkapan kompensasi manajemen kunci dipengaruhi oleh coorporate governance(CG). Kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga dalam suatu perusahaan juga berperan dalam pengungkapan wajib dilaporan keuangan. Jensen and Meckling (1976) mengungkapkan kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan menimbulkan interest alignmnt antara pemegang saham dengan perusahaan, sehingga diharapkan manajemen akan bekerja dengan lebih baik untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan serta dapat mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh stakeholder. Sedangkan kepemilikan keluarga akan mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas dan transparan bagi pemegang saham termasuk pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Komite Nasional Kebijakan Governance yang menjadi penyusun dan pengembang pedoman di indonesia sudah mengeluarkan panduan umum good governance dengan menyebutkan asas asas yaitu independensi, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran dalam perusahaan. Perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pemagang saham. Pengawasan yang baik di perusahaan

sebagai mekanisme pelaksanaan corporate governance dapat mengurangi konflik keagenan dan menimbulkan intrigued alignment antara manajemen, pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali.

Adapun faktor internal corporate governance yang dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi terkait pengungkapan keuangan perusahaan dengan lebih baik yaitu efektifitas komite audit. Seperti yang telah diungkapkan Utama (2004) bahwa komite audit yang menjalankan fungsinya dengan efektif dapat mendorong perusahaan untuk memberikan informasi terkait pengungkapan dengan lebih baik. Efektifitas komite audit sangat diperlukan agar pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif dan akan memberikan dampak bagi luasnya pengungkapan dan transparansi kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Selain faktor internal corporate governance, faktor eksternal corporate governance seperti kualitas audit juga dapat mempengaruhi luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan. Basset et al (2007) menyatakan bahwa Semakin baik kualitas audit perusahaan, maka semakin luas informasi yang diungkapkan. Kualitas audit yang disajikan oleh perusahaan yang diaudit oleh KAP yang besar memberikan informasi keuangan yang bersifat wajib dengan lebih luas (Basset et al 2007 dan Nelson dan Percy 2004). KAP yang besar dan dinilai berkualitas akan lebih transparan dan mempertahankan reputasinya dengan transparansi dalam hal pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

*Premanaged earnings* adalah laba sebelum dimanage dan belum dikelola melalui proses manajemen laba. Dalam teori akuntansi positif, dinyatakan bahwa perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk mencapai target yang diinginkan, perusahaan cenderung akan melakukan manajemen laba ketika *premanaged earnings* rendah (Daniel et al, 2008). Apabila *premanaged earnings* tinggi maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan manajemen laba, maka dari itu diharapkan *premanaged earnings* juga akan mempengaruhi luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

Seperti yang diungkapkan Farahmita (2012), Gao dan Kling (2012), Darus et al (2009), Ho dan Wong (2001), Hermalin dan Weisbach (2012). Sebagian besar riset terdahulu berfokus pada pengaruh mekanisme corporate governance terhadap tingkat luasnya pengungkapan secara umum baik laporan tahunan maupun di laporan keuangan. Wong (2011) dan Darus et al (2009) mengungkapkan bahwa riset mengenai pengungkapan kompensasi manajemen kunci menjadi salah satu pengungkapan transaksi pihak yang berelasi. Riset mengenai pengungkapan kompensasi manajemen kunci yang sesuai konteks struktur corporate governance belum ditemukan di Indonesia maupun diluar Indonesia (Farahmita, 2012).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Stalsa Farani Akymga pada tahun 2015 dengan judul "Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Di Laporan Keuangan". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel *Premanaged Earnings*. Pada

penelitian sebelumnya peneliti tidak melakukan penelitian terhadap variabel *Premanaged Earnings* sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan penelitian terhadap variabel *Premanaged Earnings*. Dalam penelitian sebelumnya studi kasus penelitian dilakukan pada perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011, sedangkan dalam penelitian ini studi kasus dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “PENGARUH STRUKTUR GOVERNANCE, KUALITAS AUDIT DAN *PREMANAGED EARNINGS* TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN KOMPENSASI MANAJEMEN KUNCI DI LAPORAN KEUANGAN”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian akan menganalisa tentang Struktur Corporate Governance, Kualitas Audit dan *Premanaged Earnings* Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Di Laporan Keuangan. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah struktur corporate governance berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan?
3. Apakah *premanaged earnings* berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui apakah struktur corporate governance berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui apakah *premanaged earnings* berpengaruh terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis dalam mengimplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dan menambah wawasan penulis tentang pengaruh corporate governance, kualitas audit dan *premanaged earnings* terhadap luas pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan oleh perusahaan yang menerapkan konsep good governance dengan pengungkapan kompensasi manajemen kunci di laporan keuangan.



Hasil penelitian ini juga diharap berkontribusi pada perkembangan penelitian mengenai dampak revisi PSAK sehubungan dengan konvergensi IFRS yang sedang berlangsung di Indonesia dan sebagai umpan balik penerapan PSAK No. 7 terkait dengan kompensasi manajemen kunci.